

BAB I PENDAHULUAN

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya perubahan terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Berkaitan dengan pertanggungjelasan penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 antara lain merupakan sarana pertanggungjelasan pengelolaan keuangan selama TA 2024 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan perioda berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/ anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (*Laporan Realisasi Anggaran*).

- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasional).
- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang APBD TA. 2023;

13. Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 900.1.3.10/162/V/BPKAD/2025 tentang
Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pendapatan LO
 - 5.1.4. Beban LO
 - 5.1.5. Aset
 - 5.1.6. Kewajiban
 - 5.1.7. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan

rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Publikasi Data Inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur di berandanya¹, dapat diketahui bahwa tingkat inflasi kumulatif tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2,28. Tingkat inflasi ini melampaui tingkat inflasi nasional yang hanya sebesar 1,87. Tingginya tingkat inflasi ini tidak terlepas dari dampak Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2021. Keadaan ekonomi makro ini cukup membebani kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai representatif dari pengaplikasian misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visinya.

Ekonomi makro yang kurang menguntungkan ini berkorelasi negatif dengan capaian pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berimplikasi pula dengan tidak adanya tambahan dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya pergeseran APBD. BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp 654.493.400,- dari anggaran murninya yaitu sebesar 31.753.603.825,-, pergeseran anggaran belanja sebesar 2%. Melalui pergeseran anggaran ini diharapkan melalui keterbatasan anggaran yang ada, pelayanan kepada masyarakat dapat tetap diberikan secara maksimum. Adapun pergeseran anggaran yang dilakukan dapat disajikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

2.1.1 Tabel Ekonomi Makro I

Kode Progr am	Kode Kegiat an	Kode Sub Kegiat an	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Berkurang	Anggaran Pergeseran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(6)-(7)
01			Perencanaan, Penganggaran,	264 976 800	-		264 976 800

01	01	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97 600 000				97 600 000
01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 257 020				10 257 020
01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 999 780				7 999 780
01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50 000 000				50 000 000
01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	50 000 000				50 000 000
01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43 400 000				43 400 000
01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 720 000				5 720 000
02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11 583 504 225				11 583 504 225
02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11 165 314 225				11 165 314 225
02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	348 190 000				348 190 000
02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika	10 000 000				10 000 000

0.2	0.4	at Kesanggupan 20.000	10.000.000	10.000.000
		Perawatan dan		
		Perawatan		
0.2	0.6	Akumulasi 20.000	1.000.000	1.000.000
		Perawatan dan		
		Perawatan dan		
		Perawatan		
		Perawatan		
0.2	0.7	Perawatan dan	4.7.000.000	4.7.000.000
		Perawatan		
		Perawatan Kesanggupan		
		Perawatan Kesanggupan		
0.3	0.3	Perawatan 20.000	1.000.000	1.000.000
		Adulterasi		
		Perawatan		
		Perawatan		
		Perawatan dan		
		Perawatan		
0.3	0.2	Perawatan	1.000.000	1.000.000
		Perawatan		
0.3	0.3	Perawatan dan	1.000.000	1.000.000
		Perawatan dan		
		Perawatan dan		
0.3	0.6	Perawatan dan	1.000.000	1.000.000
		Perawatan dan		
		Perawatan dan		
0.3	0.2	Perawatan dan	1.000.000	1.000.000
		Perawatan dan		
		Perawatan dan		
0.3	0.3	Perawatan dan	1.000.000	1.000.000
		Perawatan dan		
		Perawatan dan		

05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120.076.000				120.076.000
05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.038.000				18.038.000
06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.581.181.245				2.581.181.245
06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.064				49.999.064
06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.983.900				49.983.900
06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.449.312				15.449.312
06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.810.969				86.810.969
06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.450.000				48.450.000
06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.016.000				27.016.000
06	09		Penyelenggaraan Rapat Koori dan Konsultasi SKPD	2.246.970.000				2.246.970.000
06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.912.000				30.912.000
06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.590.000				25.590.000
07			Pengadaan Barang Milik Daerah	3.360.717.963				3.360.717.963

07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	296.071.500				296.071.500
07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.159.652.000				1.159.652.000
07	05	Pengadaan Mebel	303.313.363				303.313.363
07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	390.207.100				390.207.100
07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.062.249.600				1.062.249.600
07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.328.100				99.328.100
07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.896.300				49.896.300
08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.859.507.192				3.859.507.192
08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.998.400				29.998.400
08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	361.312.200				361.312.200
08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.050.200				161.050.200

08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 307 146 392			3 307 146 392
09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744 424 400			744 424 400
09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144 694 400			144 694 400
09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	186 204 000			186 204 000
09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38 130 000			38 130 000
09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	17 760 000			17 760 000
09	09	Pemeliharaan Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249 986 000			249 986 000
09	10	Pemeliharaan Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 150 000			10 150 000
09	11	Pemeliharaan Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	97 500 000			97 500 000

2.1.01				Lainnya	1.414.500.000				1.414.500.000
2.1.01	01			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	150.000.000				150.000.000
2.1.01	02			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	150.000.000				150.000.000
2.1.01	03			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	150.000.000				150.000.000
2.1.01	04			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	150.000.000				150.000.000
2.1.01	05			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	221.000.000				221.000.000
2.1.01	11			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	200.000.000				200.000.000

2.1.01	12		dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	193.500.000			193.500.000
2.1.01	13		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	200.000.000			200.000.000
2.1.02			Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1.404.000.000			1.404.000.000
2.1.02	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	325.000.000			325.000.000
2.1.02	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	200.000.000			200.000.000
2.1.02	03		Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	354.000.000			354.000.000
2.1.02	06		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	250.000.000			250.000.000
2.1.02	09		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	275.000.000			275.000.000
2.1.03			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3.306.500.000			3.306.500.000
2.1.03	01		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	320.000.000			320.000.000

2.1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	320.000.000			320.000.000
2.1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	245.000.000			245.000.000
2.1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	543.500.000			543.500.000
2.1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	470.000.000			470.000.000
2.1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	200.000.000			200.000.000
2.1.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	150.000.000			150.000.000
2.1.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	320.000.000			320.000.000
2.1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	125.000.000			125.000.000
2.1.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	245.000.000			245.000.000
2.1.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian	245.000.000			245.000.000
2.1.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	123.000.000			123.000.000
2.1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2.903.178.000			2.903.178.000
2.1.04	01	Penelitian, Pengembangan,	1.241.748.000			1.241.748.000

2.1.04	02	dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	162.500.000			162.500.000
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				
2.1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1.150.000.000			1.150.000.000
2.1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	198.930.000			198.930.000
2.1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	150.000.000			150.000.000

Nomenklatur Program dan Kegiatan yang disajikan diatas berbeda dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan Permendagri yang semula didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Permendagri No. 90 Tahun 2019. Pada tahun 2021 BALITBANGDA memiliki 11 program dan 37 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi
 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau

Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan

10. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
 - Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
- Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja

11. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
- Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
- Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
- Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
- Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
- Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
- Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
- Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
- Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
- Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

12. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
- Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
- Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Dengan tujuan menyelaraskan dengan misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian visinya di tahun 2024.

2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya

(aset non tunai dan aset tunai/ kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi belanja pada tahun ini adalah sebesar Rp. 26.423.322.089,- nilai ini tidak mencapai target sebesar Rp. 31.753.603.825,- atau sebesar 93,21%. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi Penurunan sebesar Rp.4.048.221.523 atau sebesar 22,38% dari realisasi belanja tahun lalu sebesar Rp. 30.471.543.612,-. Adapun penjelasan atas kenaikan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

2.3.1 Tabel Pencapaian Target Kinerja 1

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	264.976.800	80%
01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.600.000	11 Dokumen
01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.257.020	1 Dokumen

01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.999.780	1 Dokumen
01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000	1 Dokumen
01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	50.000.000	1 Dokumen
01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.400.000	21 Laporan
01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.720.000	5 Laporan
02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.583.504.225	0,18 %
02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.165.314.225	41 Orang
02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	348.190.000	12 Dokumen
02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000	1 Dokumen
02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	1 Dokumen
02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.000	1 Dokumen
02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	47.000.000	30 Laporan
03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.000.000	20 %
03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000	1 Dokumen
03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000	1 Dokumen
03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	12 Laporan
03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.000.000	12 Laporan
05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	308.114.000	40 %
05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	160.000.000	2 Paket
05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	1 Dokumen
05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	120.076.000	25 Orang

			Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.018.000	30 Orang
06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.581.181.245	75 %
06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.064	1 Paket
06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.983.900	1 Paket
06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.449.312	1 Paket
06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.810.969	1 Paket
06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.450.000	1 Paket
06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.016.000	1 Laporan
06	09		Penyelenggaraan Rapat Koori dan Konsultasi SKPD	2.246.970.000	12 Laporan
06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.912.000	1 Dokumen
06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.590.000	2 Dokumen
07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.360.717.963	30 %
07	01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	296.071.500	1 Unit
07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.159.652.000	1 Unit
07	05		Pengadaan Mebel	303.313.363	1 Paket
07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	390.207.100	5 Unit
07	09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.062.249.600	1 Unit
07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.328.100	1 Unit
07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.896.300	1 Unit
08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.859.507.192	100 %
08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.998.400	12 Laporan
08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	361.312.200	12 Laporan
08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan	161.050.200	12 Laporan

			Perlengkapan Kantor		
08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.307.146.392	13 Laporan
09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744.424.400	60 %
09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.694.400	2 Unit
09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	186.204.000	6 Unit
09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.130.000	70 Unit
09	08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	17.760.000	1 Unit
09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.986.000	2 Unit
09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.150.000	1 Unit
09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.500.000	1 Unit
2.1.01			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.414.500.000	2 %
2.1.01	01		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	150.000.000	2 Laporan
2.1.01	02		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	150.000.000	1 Laporan
2.1.01	03		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	150.000.000	1 Laporan
2.1.01	04		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	150.000.000	1 Laporan
2.1.01	05		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	221.000.000	2 Laporan
2.1.01	11		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	200.000.000	1 Laporan

			Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		
2.1.01	12		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	193.500.000	1 Laporan
2.1.01	13		Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	200.000.000	4 Rekomendasi
2.1.02			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.404.000.000	2 %
2.1.02	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	325.000.000	1 Dokumen
2.1.02	02		Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	200.000.000	1 Dokumen
2.1.02	03		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	354.000.000	1 Dokumen
2.1.02	06		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	250.000.000	1 Dokumen
2.1.02	09		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	275.000.000	1 Dokumen
2.1.03			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3.306.500.000	2 %
2.1.03	01		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	320.000.000	1 Dokumen
2.1.03	02		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	320.000.000	1 Dokumen
2.1.03	04		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	245.000.000	1 Dokumen
2.1.03	05		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	543.500.000	1 Dokumen
2.1.03	06		Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	470.000.000	6 Dokumen
2.1.03	07		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	200.000.000	2 Dokumen
2.1.03	08		Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	150.000.000	1 Dokumen
2.1.03	09		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	320.000.000	1 Dokumen
2.1.03	10		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	125.000.000	1 Dokumen
2.1.03	11		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	245.000.000	1 Dokumen
2.1.03	12		Penelitian dan Pengembangan	245.000.000	1 Dokumen

2 1 03	13		Penataan Ruang dan Pertanahan		
			Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	123 000 000	1 Dokumen
2 1 04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2 903 178 000	11 %
2 1 04	01		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 241 748 000	3 Dokumen
2 1 04	02		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	162 500 000	2 Dokumen
2 1 04	03		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1.150 000 000	3 Dokumen
2 1.04	04		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	198 930 000	2 Dokumen
2 1.04	05		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	150 000 000	1 Dokumen

Dalam pencapaian target-target tersebut, BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal dan evaluasi berkala melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2024 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

(mengikuti Program yang ada pada SIPD Penatausahaan sekarang)

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 264.976.800,- pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 191.296.700,- atau 72,19%. Hal ini efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

- ***Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (01.01)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 97.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.884.000,- atau 79,80%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

- ***Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (01.02)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.257.020,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.642.200,- atau 84,26%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

- ***Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(01.03)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.999.780,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.056.000,- atau 63,20%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran - pengeluaran selama Tahun 2024.

- ***Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD(01.04)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.428.000,- atau 92,86%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

- ***Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD(01.05)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.636.500,- atau 93,27%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

- ***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (01.06)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 43.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.650.000,- atau 15,32% efisiensi hal ini disebabkan karena terdapa Honor Narasumber dan lain-lain tidak dapat dibayarkan karena merupakan

Tupoksi dari Balitbangda Prov. Kaltim.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(01.07)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.720000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (02)

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 11.583.504.225,- pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.11.317.891.467,- atau 97,71%. Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024. ***Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (02.01)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 11.165.314.225,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.996.294.267,- atau 98,49%. hal ini disebabkan Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (02.02)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 348.190.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 269.040.000,- atau 72,27%. hal ini disebabkan Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (02.03)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (02.04)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.242.400,- atau 82,42%. Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (02.06)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. Hal ini disebabkan karena efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (02.07)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 47.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.314.800,- atau 94,29%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

- **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (03)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 23.000.000,- pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.11.892.000,- atau 51,70%. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang meninggal dunia, pensiun dan jabatan yang kosong pada Tahun 2024.

- ***Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (03.01)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%, hal ini disebabkan disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

- ***Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (03.02)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%, hal ini disebabkan disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

- ***Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (03.05)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.502.400,- atau 70,05%. hal ini disebabkan disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

- ***Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (03.06)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.389.600,- atau 69,91%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (05)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 308.114.000,- pada Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp.254.821.811,- atau 82,70%. Hal ini disebabkan disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama Tahun 2024.

- ***Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (05.02)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 122.820.000,- atau 76,76%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (05.05)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.453.000,- atau 94,53%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (05.09)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 120.076.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 116.680.000,- atau 97,17%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (05.11)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 18.038.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.868.811,- atau 32,54%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

• Administrasi Umum Perangkat Daerah (06)

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 2.581.181.245,- pada Administrasi Umum Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.687.665.161,- atau 65,38%. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang meninggal dunia, pensiun dan jabatan yang kosong pada Tahun 2024.

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (06.01)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.999.064,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.273.000,- atau 98,55%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (06.02)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.983.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 48.898.000,- atau 93,8197,83%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (06.03)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.449.312,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.132.100,- atau 97,95%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (06.04)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 86.810.969,- dan terealisasi sebesar Rp. 79.877.800,- atau 92,01%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (06.05)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 48.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.350.000,- atau 95,67%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Fasilitasi Kunjungan Tamu (06.08)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 27.016.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.864.000,- atau 47,62%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (06.09)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.246.970.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.410.570.261,- atau 62,78%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (06.10)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 30.912.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (06.11)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 25.590.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.700.000,- atau 96,52%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (07)**
BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 3.360.717.963,- pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.631.618.000,- atau 48,55%. Hal ini disebabkan oleh karena Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terdapat SiLPA Rp718.252.000 dari belanja unit Bida Sains Truck karena pengadaan tidak disetujui Sekretaris Daerah dan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terdapat SiLPA dari belanja bangunan gedung Workshop sebesar Rp888.460.800. Pembangunan tidak dilaksanakan karena Nilai Pagu lebih kecil dari hasil perhitungan pada Reviu Design tahun 2024 dengan nilai Rp2.888.458.000.

- *Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (07.01)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 296.071.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 287.650.000,- atau 97,16%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (07.02)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.159.652.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 441.400.000,- atau 38,06%. hal ini disebabkan Anggaran tersedia pada DPA Perubahan 2024 sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

- *Pengadaan Mebel (07.05)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 303.313.363,- dan terealisasi sebesar Rp. 299.650.000,- atau 98,79%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (07.06)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 390.207.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 379.824.000,- atau 97,34%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (07.09)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.062.249.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 88.369.000,- atau 8,32%. hal ini disebabkan terdapat reviu desain serta ketersediaan dana yang tidak mencukupi.

- *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (07.10)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 99.328.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.400.000,- atau 92,02%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (07.11)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.896.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 43.325.000,- atau 86,83%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

• *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (08)*

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 3.859.507.192,- pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 3.310.813.651,- atau 85,78%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Penyediaan Jasa Surat Menyurat (08.01)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 29.998.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau 33,34%. hal ini disebabkan karena banyak surat yang dikirim melalui email, WhatsApp, dan Aplikasi Srikandi.

- *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (08.02)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 361.312.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 273.597.971,- atau 75,72%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (08.03)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 161.050.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 133.581.600,- atau 82,94%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (08.04)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.307.146.392,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.893.634.080,- atau 87,50%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

• **Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (09)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 744.424.400,- pada Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 698.293.223,- atau 93,80%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (09.01)*

- Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 144.694.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 119.426.280,- atau 82,54%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (09.02)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 186.204.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 171.691.943,- atau 92,21%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (09.06)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 38.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.785.000,- atau 99,10%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (09.08)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 17.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.760.000,- atau 100%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (09.09)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 249.986.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 245.113.000,- atau 98,05%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (09.10)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.017.000,- atau 98,69%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (09.11)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 97.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 96.500.000,- atau 98,97%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

• *Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (2.1.01)*

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 1.414.500.000,- pada Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.153.684.370,- atau 81,56%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi(2.1.01.1)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 110.978.030,- atau 73,99%. hal ini disebabkan Kegiatan Fasilitasi Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan yang sudah berganti menjadi Arindama Pembangunan dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim.

- *Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang*

Pemerintah Umum (2.1.01.2)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 144.226.200,- atau 96,15%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (2.1.01.3)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 107.809.800,- atau 71,87%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (2.1.01.4)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 115.635.229,- atau 77,09%. hal ini efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (2.1.01.5)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 221.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 188.833.671,- atau 85,45%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (2.1.01.11)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 194.483.200,- atau 97,24%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan (2.1.01.12)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 193.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 108.352.100,- atau 56,00%. hal ini disebabkan karena adanya perubahan kegiatan sehingga honorarium kegiatan tidak terbayar.

- ***Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan (2.1.01.13)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 183.366.140,- atau 91,68%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

• ***Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (2.1.02)***

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar

Rp.1.404.000.000,- pada Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.340.020.516,- atau 95,44%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (2.1.02.1)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 325.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 322.057.560,- atau 99,09%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (2.1.02.2)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 192.430.983,- atau 96,22%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (2.1.02.3)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 354.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 328.117.484,- atau 92,69%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (2.1.02.6)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 234.320.200,- atau 93,73%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (2.1.02.9)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 275.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 263.094.289,- atau 95,67%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

• **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (2.1.03)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 3.306.500.000,- pada Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 2.989.767.316,- atau 90,42%. Hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (2.1.03.1)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 320.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 296.452.410,- atau 92,64%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (2.1.03.2)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 320.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 283.214.662,- atau 88,50%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- Penelitian dan Pengembang Pertanian, Perkebunan dan Pangan (2.1.03.4)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 245.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 230.307.282,- atau 94%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (2.1.03.5)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 543.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 485.833.568,- atau 89,39%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- Penelitian dan Pengembang Energi dan Sumber Daya Mineral (2.1.03.6)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 470.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 427.623.668,- atau 90,98%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (2.1.03.7)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 178.330.078,- atau 89,17%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (2.1.03.8)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 132.163.100,- atau 88,11%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (2.1.03.9)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 320.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 273.963.960,- atau 85,61%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- Penelitian dan Pengembang Perhubungan (2.1.03.10)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 104.066.100,- atau 83,25%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (2.1.03.11)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 245.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 234.579.740,- atau 95,75%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- Penelitian dan Pengembang Penataan Ruangn dan Pertanahan (2.1.03.12)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 245.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 234.350.348,- atau 95,65%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (2.1.03.13)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 123.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 108.882.200,- atau 88,52%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

• **Pengembangan Inovasi dan Teknologi (2.1.04)**

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 2.903.178.000,- pada Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 1.835.557.874,- atau 63,23%. Hal ini disebabkan karena dilakukannya pergeseran yang menyebabkan perubahan karena kendala waktu pelaksanaan kegiatan

- Penelitian, Pengembangan, dan Perkayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi(2.1.04.1)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.241.748.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 368.860.455,- atau 29,70%. hal ini karena adanya kebijakan 50% eksternal dan Internal pada pembentukan Tim Pelaksana kegiatan.

- Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangunan/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (2.1.04.2)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 162.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 160.641.455,- atau 98,86%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Daerah yang Bersifat Inovatif (2.1.04.3)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.000.686.192,- atau 87,02%. hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- *Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (2.1.04.4)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 198.930.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 190.077.576,- atau 95,55%, hal ini disebabkan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024

- *Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (2.1.04.5)*

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 115.292.196,- atau 76,86%, hal ini disebabkan karena ada kebijakan Sekda dimana tim pelaksana harus 50% eksternal 50% internal Instansi.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Kekurangan personil teknis karena banyak yang telah pensiun sementara belum ada tenaga pengganti.
- Petunjuk teknis yang seringkali berubah.
- Faktor cuaca yang tidak mendukung seringkali dijumpai saat melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*).

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tia bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2024 dan berakhir 31 Desember 2024. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi

yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Aplikasi ini dipergunakan untuk perencanaan dan penganggaran (penyajian evaluasi penganggaran Mendagri)

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan

Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)

Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.

- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)

Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- Defenisi

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- Pengukuran

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima.

Pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan pajak daerah, restibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

4.4.2.2 Belanja

- Defenisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- Pengukuran

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- Defenisi

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Pengukuran

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- Penyajian

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- Defenisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam perioda pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Pengukuran

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada perioda tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- Penyajian

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Hibah
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain

4.4.2.5 Aset

- **Defenisi**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu:

1. Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang pajak, piutang retribusi, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, persediaan dan asuransi dibayar dimuka.

2. Aset non lancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset non lancar. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- **Pengakuan**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan di peroleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

- **Pengukuran**

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out).
- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka ia dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/sosial di tahun mendatang.
- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya
- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat di kapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
 - a. Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu: Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas dan Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas.
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- Penyajian

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

Tabel Penyajian Aset I

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas

- Kas di Kas Daerah
- Kas di Bendahara Penerimaan
- Kas di Bendahara Pengeluaran
- Kas di BLUD
- Kas di Bendahara FKTP
- Kas di Bendahara BOS
- Kas Lainnya
- Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

- Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

- Piutang Pajak Daerah
- Piutang Retribusi
- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah
- Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
- Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
- Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

- Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
- Uang Muka
- Panjar Kegiatan
- Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

- Penyisihan Piutang Pendapatan
- Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

- Beban Pegawai Dibayar Dimuka
- Beban Barang Dibayar Dimuka
- Beban Jasa Dibayar Dimuka
- Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
- Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

- Persediaan Bahan Pakai Habis
- Persediaan Bahan/Material
- Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

- Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
- Investasi dalam Obligasi
- Investasi dalam Proyek Pembangunan
- Dana Bergulir
- Deposito Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya
Investasi Jangka Panjang Permanen
 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
 Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah
 Peralatan dan Mesin
 Gedung dan Bangunan
 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 Aset Tetap Lainnya
 Konstruksi Dalam Pengerjaan
 Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 Aset Tidak Berwujud
 Aset Lain-lain
 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

4.4.2.6 Kewajiban

- **Defenisi**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- **Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- **Penyajian**

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarakan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Penyajian Kewajiban 1

- **KEWAJIBAN**
 - **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**
 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Beban
- Utang Jangka Pendek Lainnya
- **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**
 - Utang Dalam Negeri
 - Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- **Defenisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

- **Penyajian**

Ekuitas disajikan di Neraca dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Ekuitas 1

- **EKUITAS**
 - EKUITAS
 - Surplus/Defisit-LO
 - Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua. Penyusunan Laporan ini juga telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2024.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan pada BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 tidak memiliki Pendapatan dikarenakan dengan berlakunya Permendagri Nomor :12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka pada tahun 2018 kegiatan pelayanan pengujian laboratorium bidang konstruksi diberhentikan sampai dengan terbitnya kebijakan dari peraturan Gubernur Kalimantan Timur terkait eksistensi UPTB-BPMSK Balitbangda Prov. Kaltim.

5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp30.471.543.612,- terealisasi sebesar Rp.30.577.991.602,- atau sebesar 91,36%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur pada

tahun 2024 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut

Tabel Belanja 1

URAIAN	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
1	2	3	$4 = (3 / 2) \cdot 100$	5
BELANJA	31.753.603.825,00	26.423.322.089,00	83,21	30.577.991.602,00
<i>BELANJA OPERASI</i>	28,405,459,562.00	24,723,534,089.00	87.04	27,332,859,624.00
Belanja Pegawai	11,511,934,225.00	11,265,334,267.00	97.86	8,988,929,161.00
Belanja Barang dan Jasa	16,893,525,337.00	13,458,199,822.00	79.66	18,343,930,463.00
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
<i>BELANJA MODAL</i>	3,348,144,263.00	1,699,788,000.00	50.77	3,245,131,978.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,368,224,263.00	1,611,419,000.00	68.04	3,229,331,978.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	979,920,000.00	88,369,000.00	9.02	0.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	15,800,000.00

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian belanja yang mencapai target dan sebagian lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu sebesar 100%. Dari target sebesar Rp. 31.753.603.825,- terealisasi sebesar Rp 26.423.322.089 atau 83,21%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel Belanja Operasi 1

Uraian	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2022
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	$4=(3/2)$	5
<i>Belanja Operasi</i>	28,405,459,562.00	24,723,534,089.00	87.04	27,332,859,624.00

Belanja Pegawai	11,511,934,225.00	11,265,334,267.00	97.86	8,988,929,161.00
Belanja Barang dan Jasa	16,893,525,337.00	13,458,199,822.00	79.66	18,343,930,463.00

▪ Belanja Pegawai

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 11.511.934.225,- untuk memberikan kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terrealisasi sebesar Rp. 11.265.334.267,- atau sebesar 97,86%.

Tabel Belanja Pegawai 1

URAIAN	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100	5
Belanja Pegawai	11,511,934,225.00	11,265,334,267.00	97.86	8,988,929,161.00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3,411,934,213.00	3,296,554,267.00	96.62	3,219,949,161.00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7,753,380,012.00	7,699,740,000.00	99.31	5,478,580,000.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	346,620,000.00	269,040,000.00	77.62	290,400,000.00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH				
Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan				
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah				

Tersisanya anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 246.599.958,- atau sebesar 2,14% disebabkan Karena Adanya Pegawai yang Meninggal Dunia.

▪ Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2024 BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda).

Tabel Belanja Barang dan Jasa 1

URAIAN	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100	5
Belanja Barang dan Jasa	16.893.525.337.00	13.458.199.822.00	79.66	18.343.930.463.00
Belanja Barang	2.532.983.845.00	2.094.754.984.00	82.70	2.350.201.384.00
Belanja Barang Pakai Habis	2.532.983.845.00	2.094.754.984.00	82.70	2.350.201.384.00
Belanja Jasa	7.187.890.492.00	5.170.006.967.00	71.93	6.096.807.764.00
Belanja Jasa Kantor	6.615.728.500.00	4.763.462.726.00	72.00	5.551.378.730.00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	198.143.592.00	162.574.080.00	82.05	159.733.760.00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	114.240.000.00	102.616.600.00	89.83	29.970.000.00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	89.400.000.00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	78.393.600.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	138.000.000.00	122.548.811.00	88.80	263.846.274.00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	43.384.800.00	18.804.750.00	43.34	2.479.000.00
Belanja Pemeliharaan	534.975.000.00	527.906.115.00	98.68	826.855.750.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	187.744.000.00	186.293.115.00	99.23	132.935.750.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	347.231.000.00	341.613.000.00	98.38	693.920.000.00
Belanja Perjalanan Dinas	6.607.976.000.00	5.635.831.756.00	85.29	9.044.365.565.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.831.970.000.00	5.635.831.756.00	96.64	8.074.998.171.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	776.006.000.00	0.00	0.00	969.367.394.00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	29.700.000.00	29.700.000.00	100.00	25.700.000.00

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga Pihak Lain Masyarakat	29.700.000.00	29.700.000.00	100.00	25.700.000.00

Tersisanya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp.3.435.325.515,- atau sebesar 20,34% disebabkan oleh karena adanya efisiensi dari kegiatan tahun 2024.

5.1.2.2 Belanja Modal

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp.3.348.144.263,- untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terrealisasi sebesar Rp.1.699.788.000,- atau sebesar 50,77 %.

Tabel Belanja Modal 1

URAIAN	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100	5
BELANJA MODAL	3.348.144.263,00	1.699.788.000,00	50,77	3.245.131.978,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.368.224.263,00	1.611.419.000,00	68,04	3.229.331.978,00
Belanja Modal Alat Besar	0.00	0.00	0.00	650.000.000.00
Belanja Modal Alat Besar Darat	0.00	0.00	0.00	650.000.000.00
Belanja Modal Alat Angkutan	1.455.685.500.00	729.050.000.00	50.08	1.084.750.000.00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.455.685.500.00	729.050.000.00	50.08	1.084.750.000.00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	35.000.000.00	34.549.000.00	98.71	0.00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	35.000.000.00	34.549.000.00	98.71	0.00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	680.746.863.00	665.671.000.00	97.79	192.240.000.00
Belanja Modal Alat Kantor	15.524.400.00	14.500.000.00	93.40	121.000.000.00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	665.222.463.00	651.171.000.00	97.89	64.340.000.00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0.00	0.00	0.00	6.900.000.00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.067.500.00	10.050.000.00	99.83	42.700.000.00
Belanja Modal Alat Studio	10.067.500.00	10.050.000.00	99.83	42.700.000.00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0.00	0.00	0.00	647.751.978.00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0.00	0.00	0.00	644.091.978.00
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0.00	0.00	0.00	3.660.000.00

Belanja Modal Komputer	186.724.400,00	172.099.000,00	92,17	611.890.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	160.073.000,00	148.156.000,00	92,56	319.390.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	26.651.400,00	23.943.000,00	89,84	292.500.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	979.920.000,00	88.369.000,00	9,02	0.00
Belanja Modal Bangunan Gedung	979.920.000,00	88.369.000,00	9,02	0.00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	979.920.000,00	88.369.000,00	9,02	0.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	15.800.000,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0.00	0.00	0.00	15.800.000,00
Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0.00	0.00	0.00	15.800.000,00

Anggaran Belanja modal sebesar Rp. 3.348.144.263,- dipergunakan untuk menambah aset berupa:

- Unit Komputer dan Laptop
- Unit Printer
- Meja & Kursi
- Peralatan Workshop
- Kursi Kerja
- Sofa
- LCD
- GPS
- Mobil Dinas
- Coffe Maker
- AC
- Lemari ES
- Smart TV
- Lemari

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp.1.648.356.263,- atau sebesar 49,23% disebabkan oleh karena Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terdapat SiLPA Rp718.252.000,- dari belanja unit Bida Sains Truck karena pengadaan tidak disetujui Sekretaris Daerah dan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terdapat SiLPA dari belanja bangunan gedung Workshop sebesar Rp888.460.800,-. Pembangunan tidak dilaksanakan karena Nilai Pagu lebih kecil dari hasil perhitungan pada Reviu Design tahun 2024 dengan nilai Rp2.888.458.000,-.

5.1.3. Pendapatan LO

Pada tahun 2024 BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki pendapatan LO.

5.1.4 Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2024 sebesar Rp.24.763.977.508,- Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp.27.806.785.744,- maka dapat diketahui terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp.3.042.808.236,- Atau 10,94%. Rincian Beban LO tahun 2024 komparasian dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel Beban LO 1

Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
BEBAN	24.763.977.508,00	27.806.785.744,00	(3.042.808.236,00)	(10,94)
BEBAN OPERASI	24.728.149.908,00	27.340.814.101,00	(2.612.664.193,00)	(9,56)
Beban Pegawai	11.265.334.267,00	8.988.929.161,00	2.276.405.106,00	25,32
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.296.554.267,00	3.219.949.161,00	76.605.106,00	2,38
Beban Tambahan Penghasilan ASN	7.699.740.000,00	5.478.580.000,00	2.221.160.000,00	40,54
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	269.040.000,00	290.400.000,00	(21.360.000,00)	(7,36)
Beban Barang dan Jasa	13.462.815.641,00	18.351.884.940,00	(4.889.069.299,00)	(26,64)
Beban Barang	2.095.734.984,00	2.359.641.074,00	(263.906.090,00)	(11,18)
Beban Jasa	5.173.642.786,00	6.095.322.551,00	(921.679.765,00)	(15,12)
Beban Pemeliharaan	527.906.115,00	826.855.750,00	(298.949.635,00)	(36,15)
Beban Perjalanan Dinas	5.635.831.756,00	9.044.365.565,00	(3.408.533.809,00)	(37,69)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	29.700.000,00	25.700.000,00	4.000.000,00	15,56
JUMLAH BEBAN OPERASI	24.728.149.908,00	27.340.814.101,00	(2.612.664.193,00)	(9,56)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	35.827.600,00	465.971.643,00	(430.144.043,00)	(92,31)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	335.497.837,00	(335.497.837,00)	(100)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	94.646.206,00	(94.646.206,00)	(100)
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	35.827.600,00	35.827.600,00	0,00	0,00

5.1.4.1 Beban Operasi

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 menanggung beban operasi sebesar Rp.24.728.149.908,-. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp.27.340.814.101,-, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp.2.612.664.193,- Atau 9,56%. Rincian Beban Operasi tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 maka terjadi Kenaikan sebesar Rp.2.276.405.106,- atau sebesar 25,32%.

5.1.4.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Bila Beban Persediaan tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 maka terjadi Penurunan sebesar Rp.4.889.069.299,- atau sebesar 26,64%, hal ini disebabkan karena adanya kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan.

5.1.4.1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Bila Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 maka terjadi Penurunan sebesar Rp.430.114.043,- atau sebesar 92,31%, hal ini disebabkan karena adanya Penyusutan ATB selama periode 1 Tahun

5.1.5. Aset

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp.20.824.320.361,67,- pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu sebesar Rp.8.246.802.961,67,-, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp.12.577.517.400,- atau 152,51%. Rincian pendapatan aset tahun 2024 beserta komparasian dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel Aset I

Uraian	2024	2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Aset			
Aset Lancar			
- Kas di Bendahara Penerimaan			
- Kas di Bendahara Pengeluaran			
- Kas di BLUD			
- Kas Lainnya			
- Piutang Pajak			
- Piutang Bukan Pajak			
- Piutang Retribusi			
- Piutang Lainnya			
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
- Persediaan	0	980.000	(100)
- Belanja dibayar dimuka			
Aset Non lancar			
- Investasi Jangka Panjang	0	0	
- Aset Tetap	19.867.182.695	7.252.857.695	173,92
- Aset Lainnya	957.137.666,67	992.965.266,67	(3,61)

5.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2024 BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki aset lancar bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp. 980.000,- maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 980.000,- Atau (100)%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.1.1 Persediaan

Persediaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,- bila dibandingkan dengan Persediaan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 980.000, maka dapat diketahui terdapat Penurunan sebesar Rp. 980.000,- Atau (100)%. Hal ini dikarenakan Maksimal penggunaan terhadap persediaan.

5.1.5.2. Aset Non lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2024 BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset non lancar sebesar Rp20.824.320.361,67,-. Bila dibandingkan dengan aset non lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp.8.245.822.961,67,-, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp.12.578.497.400,- Atau 152,54%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.1. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2024 BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp.19.867.182.695,-. Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp.7.252.857.695,-, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp.12.614.325.000,- Atau 173,92%. Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Tabel Aset Tetap 1

Uraian	2023	Bertambah	Berkurang	2024	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Aset Tetap					
Tanah	0	0	0	11.745.762.000	100
Peralatan dan Mesin	12.121.792.254	115.000.000	(946.225.000)	12.901.986.254	9,39
Gedung dan Bangunan	4.700.839.990	0	0	4.700.839.990	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	
Aset Tetap Lainnya	110.223.000	0	0	110.223.000	0

Uraian	2023	Bertambah	Berkurang	2024	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	167.716.560	88.369.000	0	256.085.560	65,4
Akumulasi Penyusutan	(9.847.714.109)			(9.847.714.109)	0

5.1.5.2.1.1. Tanah

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 memiliki Tanah sebesar Rp11.745.762.000,- Bila dibandingkan dengan tanah tahun lalu yaitu sebesar Rp. 0, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp.11.745.762.000,- Atau 100%. Perubahan nilai tanah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Penambahan

Belanja Modal : Rp.
 Hibah : Rp.
 Reklasifikasi dari : Rp.
 Hak Pakai : Rp. 11.745.762.000,-

Pengurangan

Rusak Berat : Rp.
 Dihapuskan : Rp.
 Reklasifikasi dari : Rp.
 Nilai dibawah Kapitalisasi: Rp.

5.1.5.2.1.2. Peralatan dan Mesin

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp 12.901.986.254,- Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu sebesar Rp. 12.121.792.254, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.229.331.978,- Atau 9,4%. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

Belanja Modal : Rp. 1.611.415.000,-
 Hibah : Rp.
 Reklasifikasi dari : Rp. 115.000.000,-
 Revaluasi : Rp.

Pengurangan

Rusak Berat : Rp.
 Mutasi : Rp. 845.250.000,-
 BM Menjadi Aset Tetap : Rp. 15.675.000,-

Nilai dibawah Kapitalisasi: Rp. 85.300.000,-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya sebesar Rp. 1.500.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (extracountable).

5.1.5.2.1.3. Gedung dan Bangunan

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki gedung dan bangunan sebesar Rp 4.700.839.990,- Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 4.700.839.990,-, maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan gedung dan bangunan selama tahun anggaran 2024.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp. 20.000.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp. 50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

5.1.5.2.1.4 Aset Tetap Lainnya

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 110.223.000,-Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 110.223.000,- , maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan Aset Tetap Lainnya selama tahun anggaran 2024

5.1.5.2.1.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 256.085.560,- Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu

yaitu sebesar Rp. 167.716.560,- , maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 88.369.000,- Atau 65%. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

Belanja Modal : Rp.
Hibah : Rp.
Reklasifikasi dari Gedung : Rp.88.369.000,-
Revaluasi : Rp.

Pengurangan

Rusak Berat : Rp.
Mutasi : Rp.
BM Menjadi Aset Tetap : Rp.
Nilai dibawah Kapitalisasi: Rp.

5.1.5.2.1.7. Akumulasi Penyusutan

BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2024 akumulasi penyusutan atas aset tetap Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur belum bisa disajikan karena belum melakukan perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

5.1.5.2.2. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2024 BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp 957.137.666,67,- Bila di dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 992.965.266,67,-, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 35.827.600 Atau 1.04%. Perubahan nilai aset lainnya tersebut dapat dikarenakan penambahan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024.

5.1.6. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi bernilai Rp. 25.485.879,- per 31 Desember 2024. Pada akhir tahun 2024 terdapat kewajiban sebesar Rp. 25.485.879,- Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp. 21.850.060, maka dapat

diketahui terdapat Kenaikan sebesar Rp. 3.635.819,- atau 8,6%. Penjelasan atas kenaikan/penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.1 Utang Beban

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2024 terdapat Utang beban sebesar Rp. 25.485.879,-. Bila dibandingkan dengan Utang beban tahun lalu yaitu sebesar Rp. 21.850.060,-, maka dapat diketahui terdapat Kenaikan sebesar Rp. 3.635.819,- atau 8,6%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan daya listrik pada tahun 2024.

5.1.7 Ekuitas

Kekayaan BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 20.798.834.482,67,-. Nilai ini secara matematikatis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2024 terdapat ekuitas sebesar Rp. 20.798.834.482,67,-. Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp. 8.224.952.901,67,-, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 12.573.881.581,- atau 152,4%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya belanja modal tahun 2024.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

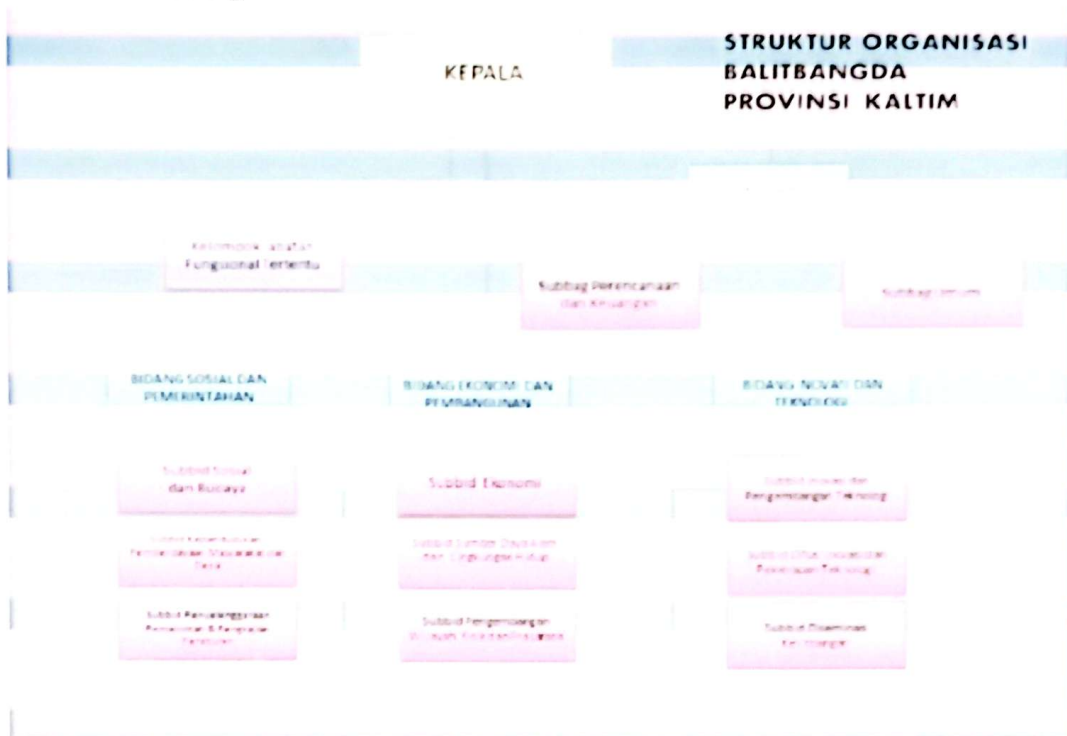
6.1. Domisili dan Struktur Organisasi

Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. Mt. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Putih kabupaten/kota Samarinda Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki UPTD/B sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan.

Pada tahun 2021 Balitbangda tidak memiliki Pendapatan dikarenakan dengan berlakunya Permendagri Nomor :12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka pada tahun 2018 kegiatan pelayanan pengujian laboratorium bidang konstruksi **diberhentikan** sampai dengan terbitnya kebijakan dari peraturan Gubernur Kalimantan Timur terkait eksistensi UPTB-BPMSK Balitbangda Prov. Kaltim, capaian kinerja Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi beroperasi sampai akhir bulan Juni Tahun 2018.

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.

Tabel Struktur Organisasi 1



Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2. Tugas dan Fungsi

Tugas Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan sebagai berikut:

➤ Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur

Tugas yang menjadi tanggungjawab Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penelitian dan pengembangan. Dalam menjalankan tugas yang

diberikan maka Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan kebijakan teknis sosial dan pemerintahan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis ekonomi dan pembangunan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3. Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel Sumber Daya Manusia I

Jabatan	Pendidikan					
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA
Kepala		1				
Kepala Bidang		4				
Kepala Sub Bidang		1	4			
Peneliti		13	1			
Staf			2		3	12
Jumlah						

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan BALITBANGDA Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 31 Januari 2024
Kepala BALITBANGDA Provinsi
Kalimantan Timur ,



Dr. M. Ir. H. Fitriansyah, S.T., M.M
Pembina Tingkat Utama Muda
NIP. 19731127 200604 1 009

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2024
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2024 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Kematian tahun 2024
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2024 (jika terdapat Pendapatan)
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2024
Lampiran VIII	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga yang menghasilkan Pendapatan (jika ada)
Lampiran IX	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga atau Kontrak Belanja yang menghasilkan Aset Tidak Berwujud (jika ada)
Lampiran X	Rekap tagihan Belanja tahun 2024 yang ditagih / dibayar tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XI	Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XII	Rekap Pendapatan-LO tahun 2024 yang belum diterima kasnya sampai dengan akhir tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIII	Rekap Penjualan Aset-Aset hasil lelang tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIV	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2024 dengan tanggal cetak diatas 31 desember 2024 dengan Validasi Bank
Lampiran XV	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVI	Register Penutupan Kas akhir tahun 2024 (yang telah diotorisasi)

Lampiran XVII	Rekap Piutang dan Penyisihannya bila terdapat piutang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVIII	Rekap Utang bila terdapat Utang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIX	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2024 yang jadi Persediaan (yang telah diotorisasi)
Lampiran XX	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXI	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2024 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XXII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2024 yang sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XXIII	Rekap Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXIV	Rincian Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXV	Foto copy berita acara serah terima barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2024
Lampiran XXVI	Rekapitulasi sewa dibayar dimuka/Asuransi dibayar dimuka (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXVII	Laporan Mutasi Kontruksi dalam pengerjaan
Lampiran XXVIII	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2024 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
Lampiran XXIX	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal (Format untuk SKPD akan disesuaikan)